

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi kemampuan setiap provinsi dalam mempertahankan ketahanan pangan di tengah kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi, kapasitas fiskal, dan struktur produksi pangan antarwilayah. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) dengan metode PROMETHEE pada 34 provinsi di Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan delapan indikator, yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian, DAK Jalan, DAK Irigasi, pertumbuhan ekonomi per kapita, pertumbuhan jumlah petani, pertumbuhan produksi padi, dan perubahan harga beras. Nilai *net flow* (Φ) digunakan untuk menggambarkan kemampuan relatif masing-masing provinsi dalam mempertahankan ketahanan pangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk saat ini efisiensi anggaran tidak selalu berdampak langsung pada menurunnya ketahanan pangan suatu daerah. Kemampuan provinsi dalam mempertahankan ketahanan pangan lebih banyak ditentukan oleh kombinasi kondisi sosial ekonomi, kapasitas produksi pangan, serta kemampuan adaptasi daerah terhadap pengurangan anggaran. Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat untuk saat ini menjadi provinsi dengan kemampuan terbaik dalam menjaga ketahanan pangan dengan nilai Φ masing-masing sebesar 0,4116; 0,3207; dan 0,3018. Kinerja tersebut didukung oleh tingginya nilai IKP, pertumbuhan jumlah petani, pertumbuhan ekonomi yang positif, serta dukungan infrastruktur dan sektor pertanian yang relatif baik. Sebaliknya, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua untuk saat ini menempati posisi terbawah dengan nilai Φ sebesar -0,2601; -0,3258; dan -0,3939. Kondisi tersebut merupakan hasil kontribusi dari rendahnya IKP, menurunnya jumlah petani, rendahnya produksi padi, meningkatnya harga beras, serta berkurangnya dukungan anggaran pada sektor pertanian dan infrastruktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, jumlah petani,

produksi padi, dan stabilitas harga beras memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah, sedangkan pengurangan anggaran dapat menurunkan kemampuan daerah mempertahankan ketahanan pangan apabila tidak diimbangi oleh kapasitas sosial ekonomi dan sektor pertanian yang memadai.

5.2. Saran

Dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan untuk studi berikutnya dan juga tindakantindakan konkret yang bisa diambil oleh pemerintah, warga, dan pihak terkaitketentuan.

5.2.1. Aspek Teoritis

- a) Penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor fiskal, ekonomi, dan sektor pertanian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari hubungan kausalitas dari indikator dalam penelitian ini dan juga bisa menambahkan variabel lain seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, luas lahan pertanian, produktivitas pertanian, indeks pembangunan manusia, inflasi pangan, serta kualitas infrastruktur logistik agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan daerah.
- b) Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan metode analisis yang digunakan dengan mengombinasikan PROMETHEE dengan metode *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) lainnya seperti AHP, ANP, TOPSIS, atau DEMATEL untuk memperoleh hasil yang lebih robust dan mampu menjelaskan hubungan antarindikator secara lebih mendalam. Penggunaan data panel antarwaktu juga dapat dilakukan untuk melihat perubahan kemampuan daerah dalam mempertahankan ketahanan pangan secara dinamis dari tahun ke tahun.
- c) Penelitian ini menggunakan data tingkat provinsi sehingga masih terdapat keterbatasan dalam menangkap kondisi ketahanan pangan yang lebih spesifik pada tingkat kabupaten/kota. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan unit analisis yang lebih rinci agar perbedaan karakteristik wilayah dapat

terlihat secara lebih jelas dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

5.2.2. Aspek Praktis

- a)** Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian, DAK Jalan, dan DAK Irigasi. Meskipun efisiensi fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas anggaran negara, pengurangan alokasi pada sektor pangan perlu dilakukan secara selektif agar tidak mengurangi kemampuan daerah dalam mempertahankan produksi, distribusi, dan akses pangan masyarakat.
- b)** Pemerintah daerah dengan kemampuan ketahanan pangan yang masih rendah, terutama di wilayah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, perlu memprioritaskan program peningkatan produktivitas pertanian melalui penguatan infrastruktur irigasi, peningkatan kualitas jalan menuju sentra produksi pangan, serta pemberian dukungan kepada petani melalui bantuan sarana produksi dan teknologi pertanian. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan daerah.
- c)** Upaya regenerasi petani perlu menjadi perhatian utama pemerintah mengingat beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan jumlah petani yang rendah bahkan mengalami penurunan. Program pelatihan pertanian modern, dukungan akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian dapat menjadi strategi untuk meningkatkan minat generasi muda dalam sektor pertanian sehingga keberlanjutan produksi pangan dapat terjaga dalam jangka panjang.
- d)** Pemerintah daerah perlu memperkuat stabilisasi harga pangan, khususnya beras, melalui peningkatan cadangan pangan daerah, optimalisasi distribusi antarwilayah, serta penguatan kerja sama dengan Bulog dan pelaku usaha pangan. Stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga akses masyarakat terhadap pangan, terutama pada daerah yang masih menghadapi kenaikan harga beras yang relatif tinggi.

- e) Provinsi-provinsi yang memperoleh peringkat tinggi dalam penelitian ini, seperti Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, dapat dijadikan contoh praktik baik (best practice) dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah. Pengalaman daerah-daerah tersebut dalam menjaga ketahanan pangan meskipun terjadi pengurangan anggaran dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam menyusun kebijakan pembangunan pertanian, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
- f) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan ketahanan pangan agar pengurangan anggaran tidak secara langsung menurunkan kemampuan daerah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dan kebutuhan daerah dapat menjadi langkah untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi penguatan ketahanan pangan nasional.